

DAMPAK KENAIKAN TARIF IMPOR AS TERHADAP INDONESIA: TANTANGAN DAN PELUANG BARU

Rizky Allam Zandriyan Pratama
Analisis Legislatif Ahli Pertama
rizky.pratama2@dpr.go.id

Ari Mulianta Ginting
Analisis Legislatif Ahli Madya
ari.ginting@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kebijakan kenaikan tarif impor yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, merupakan bagian dari strategi proteksi ekonomi yang bertujuan melindungi industri dalam negeri AS. Melalui kebijakan ini, sejumlah produk dari berbagai negara, termasuk Indonesia, dikenakan tarif impor yang lebih tinggi, khususnya pada sektor-sektor seperti tekstil, alas kaki, dan elektronik. Langkah ini diambil di tengah dinamika perdagangan global yang semakin kompetitif, di mana Amerika Serikat berupaya memperkuat posisi industrinya di pasar domestik.

Bagi Indonesia, kebijakan ini tentu membawa tantangan tersendiri. Amerika Serikat merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia, sehingga kenaikan tarif impor dapat memengaruhi volume ekspor nasional. Produk-produk unggulan Indonesia yang selama ini cukup kompetitif di pasar AS kini harus menghadapi persaingan yang lebih ketat akibat kenaikan biaya masuk. Namun, situasi ini juga menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk melakukan evaluasi dan penyesuaian strategi ekspor ke depan.

Di balik tantangan tersebut, terdapat sejumlah dampak positif yang dapat dimanfaatkan Indonesia. Kenaikan tarif impor AS mendorong pelaku usaha dan pemerintah untuk mempercepat diversifikasi pasar ekspor ke negara-negara lain seperti Uni Eropa, Timur Tengah, dan Asia Selatan. Selain itu, Indonesia masih memiliki tarif yang relatif lebih rendah dibandingkan beberapa negara pesaing, sehingga peluang untuk mempertahankan sebagian pangsa pasar di AS tetap terbuka. Kebijakan ini juga menjadi pemicu bagi industri nasional untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk agar mampu bersaing di pasar global.

Di sisi lain, dampak negatif dari situasi ini tidak dapat diabaikan dan perlu diantisipasi secara serius. Penurunan ekspor ke Amerika Serikat berisiko menekan laju pertumbuhan ekonomi nasional serta berdampak pada sektor ketenagakerjaan, khususnya di industri padat karya. Direktur Ekonomi Digital dari Central Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, mengutip data dari Dana Moneter Internasional (IMF) yang menyatakan bahwa setiap kenaikan tarif impor sebesar 1% dapat menyebabkan penurunan ekspor hingga 0,8%. Berdasarkan perhitungan tersebut, diperkirakan sekitar 191.000 pekerja di sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) berpotensi mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Selain itu, sektor minyak hewani dan nabati juga terdampak dengan potensi kehilangan sekitar 28.000 tenaga kerja. Di samping itu, masuknya produk dari negara lain ke pasar domestik juga perlu diwaspadai agar tidak melemahkan industri dalam negeri. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis dan kolaboratif untuk menjaga stabilitas dan ketahanan ekonomi nasional. Secara keseluruhan, kebijakan kenaikan tarif impor AS merupakan tantangan yang harus dihadapi dengan sikap optimis dan responsif. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen untuk terus memperkuat diplomasi perdagangan, memperluas pasar ekspor, dan memberikan dukungan kepada pelaku industri terdampak. Dengan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, Indonesia dapat mengubah tantangan ini menjadi peluang untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional.

Atensi DPR

Kebijakan kenaikan tarif impor yang diterapkan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump membawa tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia. Tarif yang meningkat pada produk ekspor utama Indonesia seperti tekstil, alas kaki, dan elektronik berpotensi menurunkan volume ekspor ke AS, salah satu mitra dagang utama. Namun, kebijakan ini mendorong Indonesia untuk mempercepat diversifikasi pasar ekspor ke wilayah lain seperti Uni Eropa, Timur Tengah, dan Asia Selatan, serta meningkatkan daya saing industri nasional. Dampak negatif seperti potensi penurunan pertumbuhan ekonomi dan risiko PHK di sektor padat karya perlu diantisipasi dengan langkah strategis. Komisi VI DPR RI sebagai mitra Kementerian Perdagangan perlu mendorong upaya diplomasi perdagangan yang lebih intensif, memperkuat pengawasan terhadap arus barang impor, serta mendorong program diversifikasi pasar dan peningkatan daya saing industri nasional. Selain itu, perhatian khusus juga perlu diberikan pada perlindungan tenaga kerja dan pemberdayaan UMKM agar dampak kebijakan ini dapat dicegah dampaknya.

Sumber

emedia.dpr.go.id, 8, 10 April 2025;
feb.ugm.ac.id, 8 April 2025;
kompas.id, 9, 15 April 2025;
tempo.co, 8, 13 April 2025;
tribunnews.com, 21 April 2025.

Minggu ke-3 April
(14 s.d. 20 April 2025)

2025



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*